

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN CILACAP TAHUN 2019

Nomor Publikasi: 33015.2003

Katalog BPS: 4102004.3301

Ukuran Buku: 18,2 cm x 25,7 cm

Jumlah halaman: ix + 42 halaman

Naskah: Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar Kulit: Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

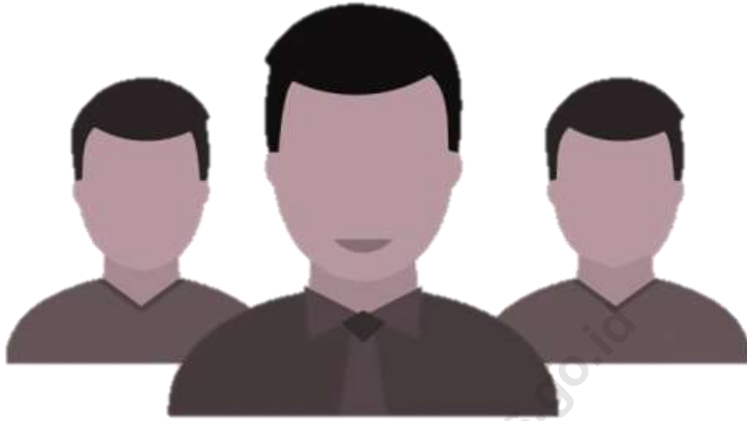
Diterbitkan Oleh: ©Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap

Dicetak Oleh: ©Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Prohibited announce, distribute, communicate, and/or copy part or all of the contents of this book for commercial purposes without the written permission of the Central Bureau of Statistics.

TIM PENYUSUN



Penanggungjawab Umum
Toto Desanto, S.Si, M.Si

Penyunting:
Solikhin, SST, M.Si

Penulis & Pengolah Data
Lulu Lestari, SST

KATA PENGANTAR

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Cilacap Tahun 2019 merupakan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cilacap yang didalamnya membahas tentang kondisi terkini kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut meliputi aspek: kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan kemiskinan. Data yang digunakan berasal dari survei-survei BPS dan data dari instansi lain yang terkait. Publikasi ini diharapkan mampu digunakan sebagai salah satu acuan bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan kesejahteraan masyarakat Cilacap kedepan.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini. Semoga publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Cilacap Tahun 2019 memberikan manfaat bagi banyak pihak.

Cilacap, September 2020

↳ Kepala BPS Kabupaten Cilacap



Toto Desanto, S.Si, M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	IV
Daftar Isi	V
Daftar Gambar	VII
Daftar Tabel	IX
KEPENDUDUKAN CILACAP	1
JUMLAH, LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK DAN RASIO JENIS KELAMIN ...	1
PERSEBARAN DAN KEPADATAN PENDUDUK	3
ANGKA BEBAN KETERGANTUNGAN	4
WANITA MENURUT USIA PERKAWINAN PERTAMA	5
PENGGUNAAN ALAT/CARA KB	6
KESEHATAN & GIZI CILACAP	9
DERAJAT DAN STATUS KESEHATAN PENDUDUK	9
TINGKAT IMUNITAS DAN GIZI BALITA	10
PEMANFAATAN FASILITAS TENAGA KESEHATAN	13
PENDIDIKAN CILACAP	16
PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN	17
ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH	19
KETENAGAKERJAAN CILACAP	21
TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)	22
LAPANGAN PEKERJAAN DAN STATUS PEKERJAAN	24
PEKERJA MENURUT USIA	25
TARAF & POLA KONSUMSI CILACAP	27
PENGELUARAN RUMAH TANGGA	27
KONSUMSI KALORI DAN PROTEIN	31

PERUMAHAN CILACAP	32
GAMBARAN PERUMAHAN DI INDONESIA	32
KONDISI FISIK BANGUNAN	33
FASILITAS PERUMAHAN	36
STATUS KEPEMILIKAN RUMAH.....	37
KEMISKINAN CILACAP.....	39
PERKEMBANGAN PENDUDUK MISKIN.....	39
KARAKTERISTIK PERUMAHAN RUTA MISKIN.....	42

<https://cilacapkab.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Laju pertumbuhan penduduk kabupaten Cilacap, 2015-2019.	2
Gambar 1.2 Jumlah penduduk dan rasio jenis kelamin di kabupaten Cilacap, 2015-2019	3
Gambar 1.3 Kepadatan penduduk kabupaten Cilacap (jiwa/km ²), 2015-2019.....	3
Gambar 1.4 Persentase Wanita Umur 10+ Tahun Pernah Kawin menurut Usia Perkawinan Pertama, 2018 dan 2019	6
Gambar 2.1 Angka kesakitan dan rata-rata lamanya sakit di kabupaten Cilacap, 2018-2019.....	10
Gambar 2.2 Cakupan imunisasi menurut jenisnya di kabupaten Cilacap, 2016- 2018	12
Gambar 2.3 Persentase penduduk yang berobat jalan menurut tempat berobat dan klasifikasi wilayah di kabupaten Cilacap, 2018-2019.....	14
Gambar 3.1 Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas menurut jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan di kabupaten Cilacap tahun 2019..	18
Gambar 3.2 Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas menurut klasifikasi wilayah dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan di kabupaten Cilacap tahun 2016-2017.....	16
Gambar 4.1 Tingkat Partipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka, 2018-2019.....	23
Gambar 4.2 Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin di kabupaten Cilacap, 2018-2019...	24
Gambar 4.3 Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan usaha dan jenis kelamin di kabupaten Cilacap, 2018 dan 2019.....	25
Gambar 5.1 Proporsi pengeluaran rumah tangga di kabupaten Cilacap, 2017-2019	28
Gambar 5.2 Distribusi pembagian pengeluaran per kapita di kabupaten Cilacap, 2013-2017	30
Gambar 6.1 Persentase rumah dengan atap layak, Kabupaten Cilacap 2017-2019.....	33

Gambar 6.2 Persentase rumah menurut jenis dinding, Kabupaten Cilacap 2019.....	34
Gambar 6.3 Persentase rumah berlantai layak, Kabupaten Cilacap 2017-2019.....	35
Gambar 6.4 Status kepemilikan rumah berdasarkan tipe wilayah di Kabupaten Cilacap tahun 2018.....	36
Gambar 7.1 Jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Cilacap tahun 2015-2019	40
Gambar 7.2 Indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) kabupaten Cilacap, 2017-2019	41
Gambar 7.3 Persentase rumah tangga miskin Cilacap yang tidak memiliki fasilitas MCK dan sumber air minumnya tidak terlindung, 2017-2019	42

<https://cilacapkab.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan, 2016-2019.....	4
Tabel 1.2 Persentase wanita berumur 15-49 tahun dan pernah kawin yang sedang menggunakan alat/cara kontrasepsi menurut daerah tempat tinggal dan alat/cara kontrasepsi yang digunakan di kabupaten Cilacap, 2018 dan 2019.....	7
Tabel 2.1 Persentase anak usia kurang dari dua tahun yang pernah disusui dan lamanya disusui DI Kabupaten Cilacap 2019	11
Tabel 3.1 Rata-rata lama sekolah (tahun) dan harapan lama sekolah (tahun) di Kabupaten Cilacap, 2017-2019.....	16
Tabel 3.2 Angka Partisipasi Sekolah menurut usia sekolah dan jenis kelamin di kabupaten Cilacap, 2018-2019	20
Tabel 3.3 Angka Partisipasi Murni (APM) menurut usia sekolah dan jenis kelamin di kabupaten Cilacap, 2018-2019	18
Tabel 4.1 Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja menurut kelompok umur dan jenis kelamin di kabupaten Cilacap, 2018-2019	26
Tabel 5.1 Rata-rata pengeluaran per kapita menurut jenisnya di kabupaten Cilacap, 2017-2019.....	27
Tabel 5.2 Konsumsi energi dan protein per kapita per hari menurut daerah tempat tinggal di kabupaten Cilacap, 2017-2019	31
Tabel 6.1 Persentase rumah tangga menurut luas lantai per kapita, 2017-2019.....	35
Tabel 6.2 Persentase rumah tangga menurut beberapa fasilitas perumahan di Kabupaten Cilacap tahun 2019.....	37

KEPENDUDUKAN CILACAP

Jawa Tengah merupakan provinsi dengan penduduk terbesar ketiga di Indonesia setelah Jawa Barat dan Jawa Timur. Lima puluh enam persen penduduk Indonesia menempati Pulau Jawa, termasuk provinsi Jawa Tengah. Penyumbang jumlah penduduk terbesar di Jawa Tengah adalah Kota Semarang, kemudian disusul Kabupaten Brebes di urutan kedua dan kabupaten Cilacap di urutan ketiga. Tingginya jumlah penduduk merupakan tantangan besar bagi negara berkembang, termasuk Indonesia.



Sumber gambar: vektorstock.com

Beberapa teori dan penelitian terkini muncul untuk mengendalikan pertumbuhan jumlah penduduk. Salah satu yang populer adalah teori *Neo-Malthusian*. Teori tersebut menyebutkan bahwa untuk mengendalikan jumlah penduduk maka angka kelahiran juga harus dikendalikan. Caranya dengan *preventive checks* atau penggunaan alat kontrasepsi.

Penggunaan kontrasepsi sudah dijadikan salah satu program nasional Indonesia yaitu dengan pencaangan program Keluarga Berencana (KB). KB merupakan solusi untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, sehingga terwujud penduduk yang sejahtera. Kesejahteraan menjadi salah satu tujuan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 dengan visi “CILACAP SEMAKIN SEJAHTERA SECARA MERATA” (bangga membangun desa). Visi tersebut mengandung maksud bahwa Kabupaten Cilacap akan menjadi Kabupaten dengan masyarakat yang sejahtera dan pembangunan yang dilaksanakan merata di seluruh kecamatan. Pencapaian visi tersebut memperhatikan BANGGA MBANGUN DESA yang memiliki 4 (empat) pilar yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lingkungan sosial budaya.

JUMLAH, LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK DAN RASIO JENIS KELAMIN

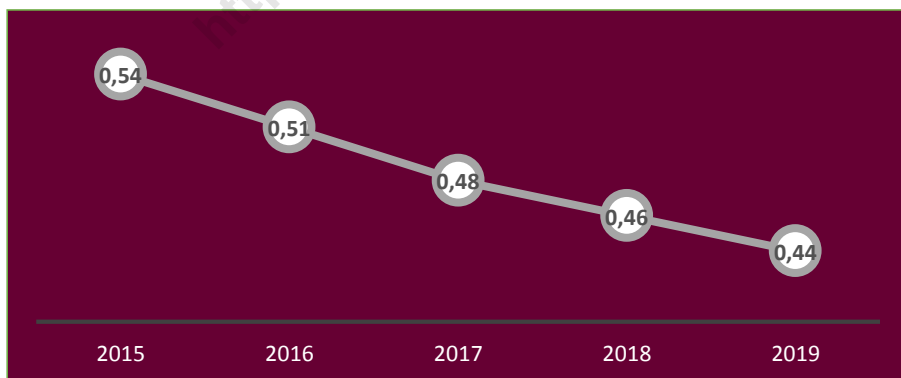
Jumlah penduduk Kabupaten Cilacap pada tahun 2019 berdasarkan proyeksi Sensus Penduduk (SP) 2010 tercatat sebanyak 1.727.098 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan setiap tahunnya. Pertambahan penduduk pada tahun 2010 sampai dengan 2012 adalah 10 ribu jiwa. Namun, pada periode 2013 sampai

dengan 2019 pertambahan penduduk berkisar di angka 9 ribu sampai dengan 7 ribu jiwa, dimana pada tahun 2019 pertambahan penduduk sebesar 7.594 jiwa.

Secara persentase laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Cilacap tahun 2015 dibanding tahun sebelumnya sebesar 0,54 persen, tahun 2016 sebesar 0,51 persen dan terus menurun hingga tahun 2019 laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,44 persen. Bila membandingkan laju pertumbuhan penduduk di wilayah eks Karesidenan Banyumas pada 2019 terlihat Kabupaten Cilacap memiliki laju pertumbuhan penduduk terendah sedangkan Kabupaten Purbalingga memiliki laju pertumbuhan penduduk tertinggi sebesar 0,95 persen, diikuti Kabupaten Banyumas sebesar 0,83 persen dan Kabupaten Banjarnegara sebesar 0,54 persen.

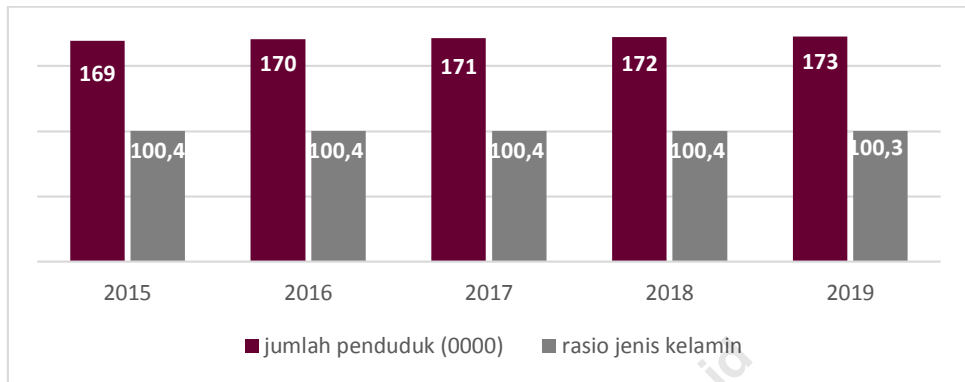
Dilihat berdasarkan komposisi penduduk menurut jenis kelamin penduduk laki-laki dan perempuan, rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Cilacap pada tahun 2019 sebesar 100,34. Artinya dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 101 penduduk laki-laki. Dengan kata lain, jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Cilacap lebih sedikit daripada laki-laki. Rasio jenis kelamin Kabupaten Cilacap lebih besar bila dibandingkan dengan rasio jenis kelamin Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 98,32. Di provinsi Jawa Tengah, kabupaten/kota dengan rasio jenis kelamin lebih dari 100 terdapat sebanyak 7 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Brebes.

Gambar 1.1 Laju pertumbuhan penduduk kabupaten Cilacap, 2015-2019



Sumber: Proyeksi penduduk SP 2010

Gambar 1.2 Jumlah penduduk dan rasio jenis kelamin di kabupaten Cilacap, 2015-2019



Sumber: Proyeksi penduduk SP 2010

PERSEBARAN DAN KEPADATAN PENDUDUK

Persebaran penduduk yang tidak merata merupakan permasalahan yang terus menerus terjadi di Indonesia. Salah satu contohnya adalah yang terjadi di Pulau Jawa. Luas wilayah Pulau Jawa hanya 7 persen dari wilayah Indonesia, tetapi jumlah penduduknya mencapai lebih dari 50 persen dari keseluruhan jumlah penduduk Indonesia. Distribusi penduduk yang tidak merata ini mengakibatkan kepadatan penduduk yang tinggi. Pada tahun 2019 di wilayah eks Karesidenan Banyumas, Kabupaten Purbalingga memiliki kepadatan penduduk tertinggi sebesar 1.378 jiwa/km², selanjutnya Kabupaten Banyumas sebesar 1.268 jiwa/km², Kabupaten Banjarnegara sebesar 902 jiwa/km² dan Kabupaten Cilacap 813 jiwa/km².

Melihat angka kepadatan penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Cilacap tahun 2018 terlihat Kecamatan Cilacap Selatan merupakan kecamatan dengan angka kepadatan penduduk terbesar yaitu 9.147 jiwa/km². Sedangkan angka kepadatan penduduk terkecil adalah Kecamatan Kampunglaut yaitu sebesar 103 jiwa/km².

Gambar 1.3 Kepadatan penduduk kabupaten Cilacap (jiwa/km²), 2015-2019

2015 (802 jiwa/km²)



2016 (806 jiwa/km²)



2017 (789 jiwa/km²)



2018 (810 jiwa/km²)



2019 (813 jiwa/km²)



Sumber: Proyeksi penduduk SP 2010

ANGKA BEBAN KETERGANTUNGAN

Angka beban ketergantungan merupakan angka yang menyatakan perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (di bawah 15 tahun dan 65 tahun keatas) dengan usia produktif (antara 15 sampai 64 tahun) dikalikan 100. Angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) adalah salah satu indikator kependudukan yang penting. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk yang tidak produktif.

Selama periode tahun 2015-2019 angka ketergantungan setiap tahun cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2019 angka beban tanggungan Kabupaten Cilacap sebesar 51,57 persen. Hal ini menunjukkan bahwa dari 100 penduduk usia produktif harus menanggung 52 penduduk usia tidak produktif.

Tabel 1.1 Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan, 2015-2019

Tahun	0-14 Tahun	15-64 Tahun	65 Tahun +	Angka Beban Ketergantungan (Jiwa)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2015	449,482	1,113,565	131,679	52.19

Tahun	0-14 Tahun	15-64 Tahun	65 Tahun +	Angka Beban Ketergantungan (Jiwa)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2016	446,059	1,121,390	135,941	51.90
2017	442,667	1,128,364	140,596	51.69
2018	439,514	1,134,293	145,697	51.59
2019	436,322	1,139,456	151,320	51.57

Sumber: Proyeksi penduduk SP 2010

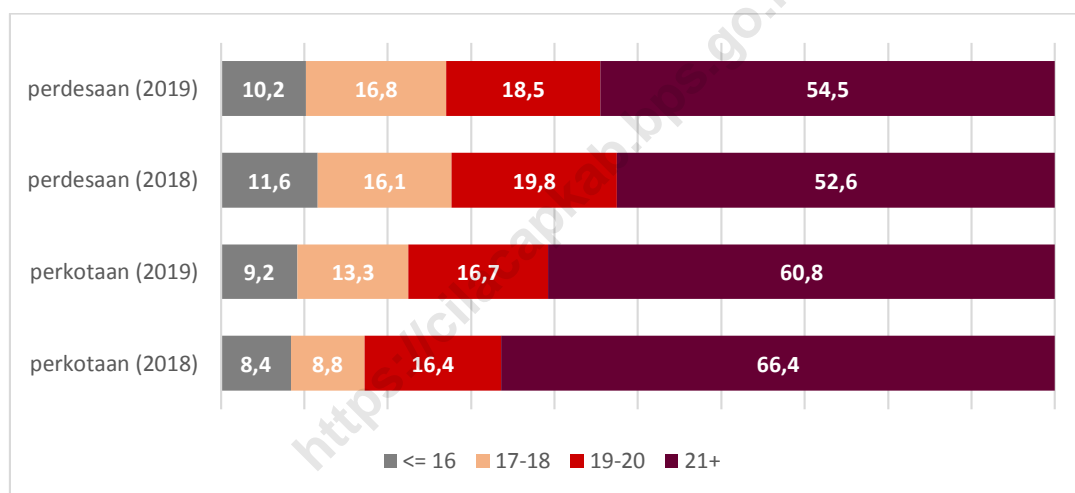
Rasio ketergantungan yang terus menurun beberapa tahun ini diperkirakan akan mencapai titik terendah pada periode 2020-2030. Pada periode itu akan terjadi fenomena bonus demografi yang bisa menjadi peluang untuk memajukan kesejahteraan penduduk Indonesia dengan meningkatkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Menurunnya angka beban ketergantungan diikuti pula dengan menurunnya proporsi penduduk usia muda (0-14 tahun) sebagai dampak dari menurunnya laju pertumbuhan penduduk. Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2015 ada sebanyak 26,52 persen penduduk yang berusia muda (0-14 tahun) hingga tahun 2019 terus turun menjadi 25,26 persen. Struktur umur penduduk kabupaten Cilacap masih didominasi oleh penduduk usia produktif mencapai 65.70 persen pada tahun 2015 dan terus meningkat setiap tahunnya hingga menjadi 65,97 persen pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia produktif di Kabupaten Cilacap sangat potensial sebagai pasar tenaga kerja. Sementara itu proporsi penduduk usia lanjut (65 tahun keatas) semakin bertambah dari 7,76 persen pada tahun 2015 menjadi 8,76 persen pada tahun 2019.

WANITA MENURUT USIA PERKAWINAN PERTAMA

Definisi usia perkawinan pertama adalah umur pada saat wanita melakukan perkawinan secara hukum dan biologis yang pertama kali. Menurut Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan, batas minimal usia perkawinan baik untuk perempuan maupun laki-laki adalah 19 tahun. Penduduk yang menikah sebelum batasan usia tersebut harus melewati sidang hukum pada Pengadilan Agama di masing-masing wilayah. Sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan anak usia minimal untuk menikah bagi wanita yaitu sudah berumur 18 tahun. Sementara itu, menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional usia perkawinan pertama idealnya usia 21 hingga 25 tahun.

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2019, persentase wanita yang melakukan perkawinan pertama sebelum 21 tahun lebih kecil dibandingkan dengan perempuan yang menikah di atas usia 21 tahun. Hal tersebut terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan. Penundaan usia perkawinan merupakan indikasi yang positif untuk menekan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Cilacap. Meningkatnya rentang usia kawin pertama pada wanita sangat dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Semakin tinggi pendidikan seorang perempuan maka mereka cenderung menunda untuk melangsungkan perkawinan.

Gambar 1.4 Persentase Wanita Umur 10+ Tahun Pernah Kawin menurut Usia Perkawinan Pertama, 2018 dan 2019



Sumber: Susenas

PENGGUNAAN ALAT/CARA KB

Menurut Undang-undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi program KB, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Berdasarkan hasil Susenas tahun 2018-2019, persentase wanita berumur 10-54 tahun berstatus pernah kawin yang sedang menggunakan alat/cara KB mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran

masyarakat akan pengendalian jumlah penduduk semakin tinggi. Jika dilihat menurut daerah tempat tinggal, persentase wanita pengguna kontrasepsi di perdesaan lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan. Informasi mengenai KB sudah tersampaikan dengan baik karena mencapai seluruh lapisan masyarakat baik yang ada di perdesaan maupun perkotaan.

Tabel 1.2 Persentase wanita berumur 10-54 tahun dan pernah kawin yang sedang menggunakan alat/cara kontrasepsi menurut daerah tempat tinggal dan alat/cara kontrasepsi yang digunakan di kabupaten Cilacap, 2018 dan 2019

Alat/Cara Kontrasepsi (1)	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+Perdesaan	
	2018 (2)	2019 (3)	2018 (4)	2019 (5)	2018 (6)	2019 (7)
Sterilisasi wanita/tubektomi/MOW	5,3	5,6	2,8	1,8	3,6	3,1
IUD/AKDR/spiral	13,6	16,8	7,9	10,1	9,8	12,3
Suntikan	30,3	32,3	49,2	58,1	42,7	49,5
Susuk KB/Implan	10,6	7,5	14,6	9,9	13,2	9,1
Pil	25,0	27,8	13,8	18,5	17,6	21,6
Kondom pria/karet KB	4,5	4,0	5,5	1,5	5,2	2,3
Pantang berkala	8,3	5,3	5,1	0,0	6,2	1,8
Lainnya	2,3	0,7	1,2	0,0	1,6	0,2
% wanita yang menggunakan	39,9	46,2	51,3	53,7	46,7	50,9

Sumber: Susenas

Berbagai macam alat/cara KB digunakan oleh pasangan usia subur di kabupaten Cilacap namun yang paling banyak peminatnya adalah penggunaan alat KB suntikan dan pil yang bersifat jangka pendek. Pil dan suntik termasuk alat KB Non-MKJP (tidak termasuk Metode Kontrasepsi Jangka Pendek) yang rawan putus dalam penggunaannya. Pada tahun 2018 penggunaan alat KB suntikan mencapai 42,7 persen dan selanjutnya mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 49,5 persen. Begitu juga untuk penggunaan alat KB pil yang mengalami kenaikan dimana pada tahun 2018 sebesar 17,6 persen dan setahun berikutnya menjadi 21,6 persen.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, di wilayah perkotaan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap alat kontrasepsi jangka panjang lebih tinggi daripada di perdesaan. Alat kontrasepsi jangka panjang antara lain Metode Operasi Wanita (MOW)/tubektomi dan *Intrauterine Device* (IUD)/Alat Kontraspsi Dalam Rahim (AKDR)/spiral. Dari kedua alat kontrasepsi jangka panjang ini yang paling diminati adalah IUD/AKDR/spiral baik di wilayah perkotaan maupun wilayah perdesaan. Hal ini disebabkan karena alat kontrasepsi IUD/AKDR/spiral ini merupakan alat kontrasepsi yang paling efektif dan lebih sedikit efek sampingnya. Penggunaan IUD/AKDR/spiral mengalami peningkatan dalam dua tahun terakhir baik di perdesaan maupun perkotaan.

<https://cilacapkab.bps.go.id>

KESEHATAN & GIZI

CILACAP

Indikator pembangunan dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Salah satu komponen indikator pembangunan adalah tingkat kesehatan. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi daerah tersebut. Pemerintah Kabupaten Cilacap menuangkan program kesehatan dalam RPJMD 2017-2022 yaitu meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat.



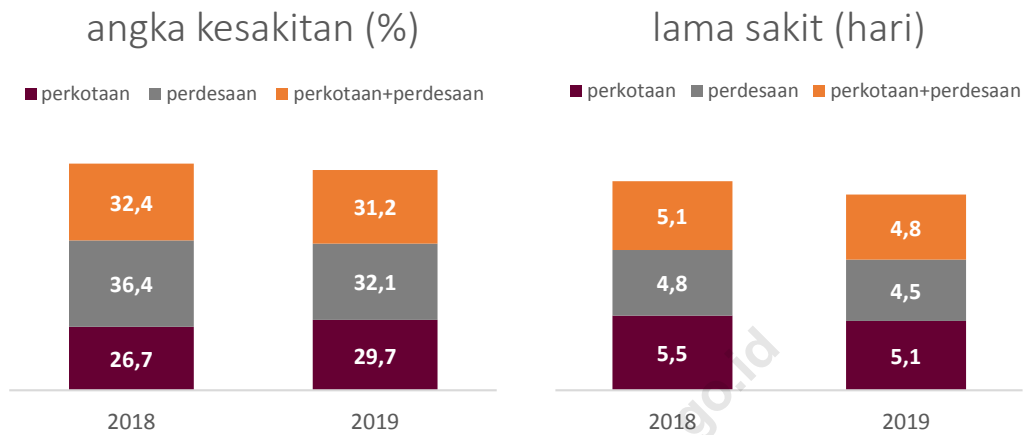
Sumber gambar: freepik.com

DERAJAT DAN STATUS KESEHATAN PENDUDUK

Derajat kesehatan merupakan salah satu ukuran kesehatan dan kualitas sumber daya manusia. Derajat kesehatan dapat digambarkan oleh 4 faktor yaitu faktor perilaku, lingkungan, keturunan dan pelayanan kesehatan. Peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan, meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat, menurunnya kasus penyakit menular, penanganan balita gizi buruk yang baik dan tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang memadai.

Merujuk pada konsep yang diterapkan BPS dalam Susenas, morbiditas atau angka kesakitan menunjukkan adanya gangguan/keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Hasil susenas tahun 2019 menunjukkan angka kesakitan penduduk Kabupaten Cilacap mencapai 31,20 persen, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 32,40 persen. Angka kesakitan untuk penduduk perdesaan pada tahun 2019 lebih kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mengindikasikan bahwa tingkat kesehatan masyarakat perdesaan mengalami perbaikan. Sebaliknya, penduduk perkotaan justru tingkat kesehatannya semakin menurun.

Gambar 2.1 Angka kesakitan dan rata-rata lamanya sakit di kabupaten Cilacap, 2018-2019



Sumber: Susenas

Indikator lain selain angka kesakitan yaitu rata-rata lama sakit penduduk. Lamanya sakit merupakan salah satu indikator yang memberikan gambaran mengenai kondisi keluhan kesehatan yang dirasakan oleh penduduk suatu wilayah. Hasil Susenas 2019 menunjukkan penurunan lamanya sakit dibandingkan tahun 2018. Semakin sedikit lama sakit yang dialami maka produktivitas masyarakat akan tetap terjaga. Lama sakit yang dialami oleh masyarakat mengalami penurunan baik di wilayah perdesaan maupun perkotaan.

TINGKAT IMUNITAS DAN GIZI BALITA

Gizi yang baik adalah salah satu unsur penting untuk mewujudkan manusia yang berkualitas. Pemenuhan gizi anak harus diperhatikan sedini mungkin yaitu sejak masih dalam kandungan melalui makanan ibu hamil. Selain itu pemberian Air Susu Ibu (ASI) sangat dianjurkan karena ASI merupakan makanan pertama dan terbaik bagi bayi. ASI mengandung berbagai zat gizi yang dibutuhkan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan bayi. Bayi yang mendapatkan ASI akan memiliki kekebalan tubuh yang kuat karena ASI mengandung zat antibodi pembentuk kekebalan tubuh yang bisa membantu melawan bakteri dan virus. Oleh karena itu pemerintah menganjurkan agar seorang ibu dapat memberikan ASI eksklusif kepada bayi. Pemberian ASI eksklusif adalah pemberian ASI saja pada bayi sampai usia 6 bulan tanpa tambahan cairan ataupun makanan lainnya.

Selanjutnya setelah bayi berusia 6 bulan keatas dilanjutkan dengan pemberian makanan tambahan dan ASI tetap diberikan hingga usia 2 tahun. Pedoman pemberian makanan tambahan saat ini dikampanyekan oleh pemerintah dengan Pedoman Gizi Seimbang menggantikan slogan Makanan 4 Sehat 5 Sempurna. Istilah Makanan 4 Sehat 5 Sempurna tersebut mulai dikenalkan tahun 1952. Namun slogan tersebut dianggap sudah tidak memenuhi perkembangan dan pemenuhan gizi manusia saat ini. Pedoman Gizi Seimbang mengacu pada *Nutrition Guide for Balanced Diet*, yaitu hasil kesepakatan konferensi pangan sedunia pada tahun 1992. Pedoman Gizi Seimbang memiliki 4 pilar prinsip yaitu : konsumsi makanan beragam, membiasakan perilaku hidup bersih, melakukan aktivitas fisik, serta mempertahankan dan memantau berat badan dalam batas normal.

Tabel 2.1 *Persentase anak usia kurang dari dua tahun yang pernah disusui dan lamanya disusui di Kabupaten Cilacap tahun 2019*

Daerah tempat tinggal	Anak usia kurang dari 2 tahun yang pernah disusui (%)	Rata-rata lama disusui (bulan)	ASI Eksklusif (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan	95,0	10,68	50,0
Perdesaan	94,5	11,18	41,9
Perkotaan+perdesaan	94,7	10,96	45,5

Sumber: Susenas

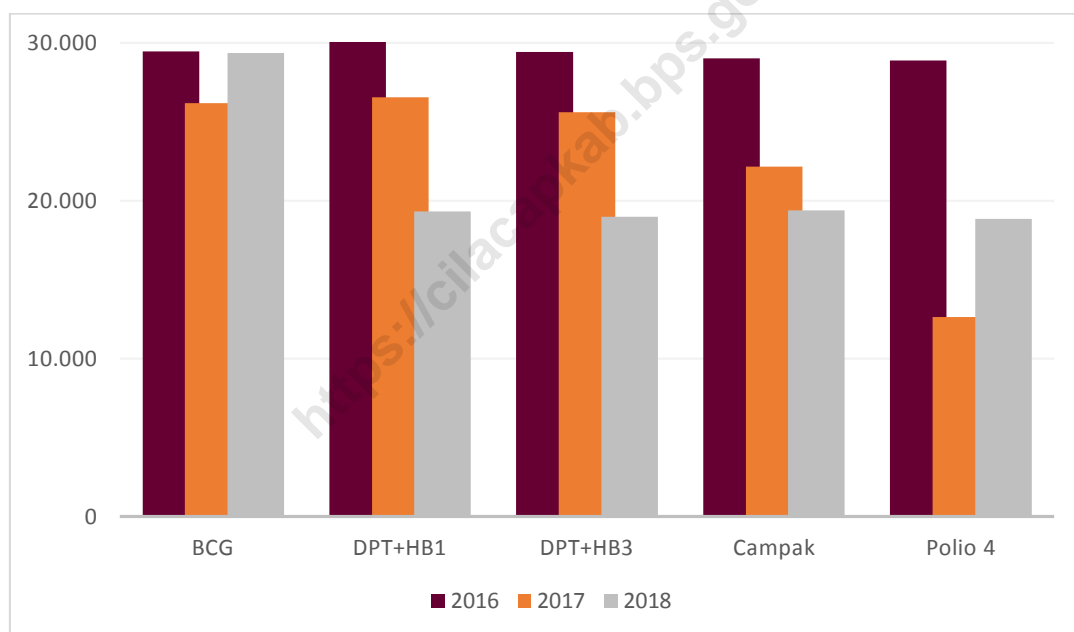
Hasil Susenas 2019 menunjukkan bahwa anak usia kurang dari 2 tahun yang pernah disusui di Kabupaten Cilacap sebanyak 94,7 persen. Persentase anak yang pernah disusui di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan anak perdesaan. Namun, jika dilihat dari lamanya maka anak-anak perdesaan lebih lama menyusui kepada ibunya yaitu sekitar 11 bulan.

Di Kabupaten Cilacap masih ada bayi yang tidak diberikan ASI oleh ibunya sebanyak 5 persen pada tahun 2019. Banyak faktor yang menyebabkan ibu tidak memberikan ASI diantaranya yaitu : ibu memiliki pekerjaan diluar rumah yang mengharuskan anak ditinggal pada suami atau pengasuh, kurangnya pengetahuan ibu akan manfaat ASI. Selain itu kendala ibu dalam menyusui ada dua faktor, pertama faktor internal yaitu kurangnya pengetahuan ibu tentang manajemen laktasi, kedua faktor eksternal yaitu kurangnya ASI atau ASI belum keluar pada hari-hari pertama sehingga perlu tambahan susu formula, kurang mengertinya ibu tentang kolostrum

dan masih ada anggapan bahwa ASI ibu kurang gizi dan kualitasnya tidak baik. Padahal pemberian ASI eksklusif sangat bermanfaat untuk bayi.

Pemberian ASI eksklusif didapat oleh 45 persen anak usia kurang dari dua tahun di wilayah Cilacap. Pemberian ASI eksklusif lebih besar di wilayah perkotaan dibanding perdesaan. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi pemberian ASI eksklusif di wilayah perkotaan sudah cukup berhasil. Kampanye pemberian ASI eksklusif saat ini sudah mulai gencar di berbagai kalangan terutama melalui media sosial. Sehingga para ibu pekerja tetap bisa memberikan ASI secara eksklusif meskipun bekerja karena ada manajemen pemberian ASI yang baik.

Gambar 2.2 Cakupan imunisasi menurut jenisnya di Kabupaten Cilacap, 2016- 2018



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap

Selain ASI, imunisasi juga sangat diperlukan dalam masa pertumbuhan anak. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, imunisasi merupakan suatu upaya untuk mencegah terjadinya penyakit menular yang merupakan salah satu prioritas Kementerian Kesehatan untuk mencapai *Sustainable Development Goals (SDGs)* khususnya dengan menurunkan angka kematian anak. Ada dua jenis imunisasi yaitu imunisasi wajib dan imunisasi pilihan. Imunisasi yang wajib

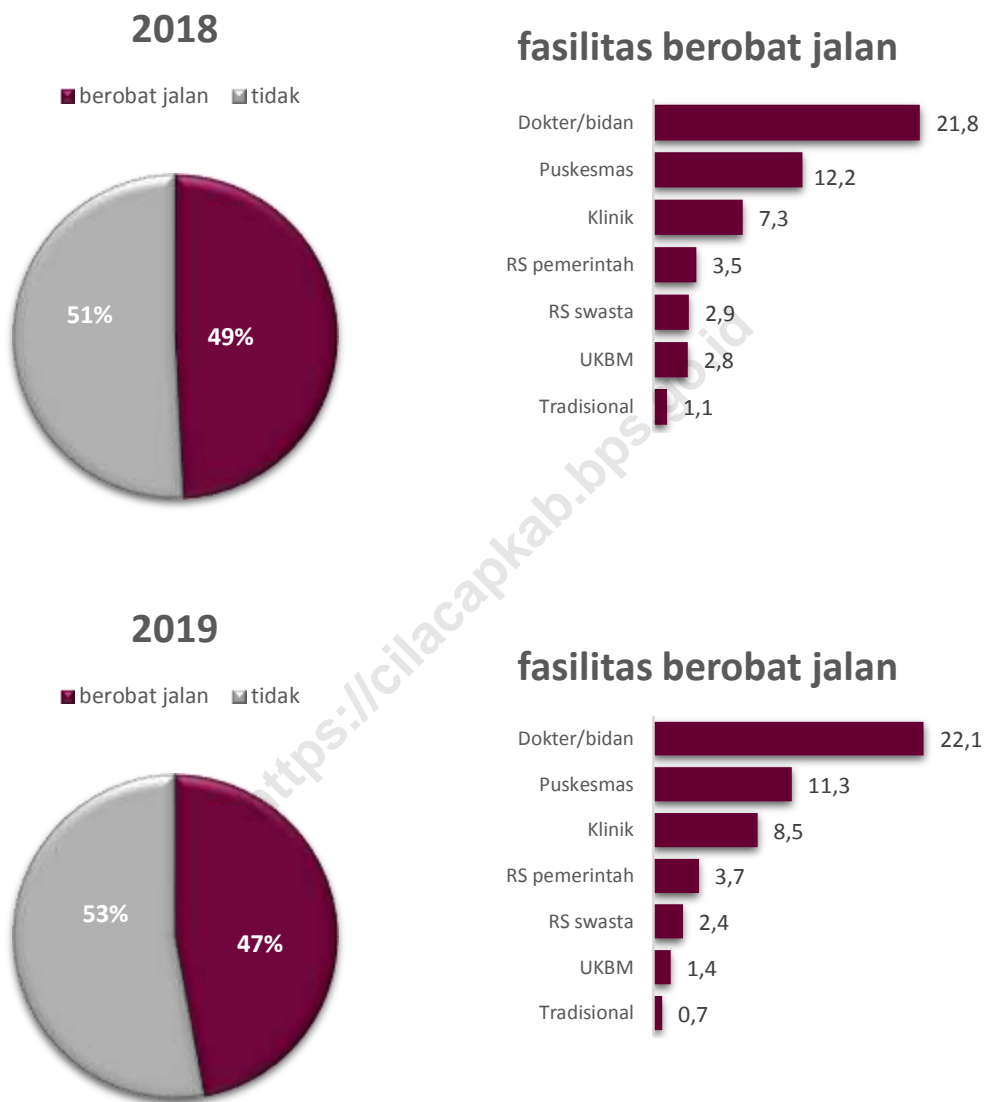
diberikan pada balita menurut pemerintah terdiri atas BCG (*Bacillus Calmette Guerin*), DPT (Difteri, Pertusis, Tetanus) , Polio, Campak/Morbili dan Hepatitis B. Sedangkan imunisasi pilihan dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan masing_masing antara lain vaksin MMR (*Measles, Mums, Rubella*), Hib, Tifoid, Varisela, Hepatitis A, Influenza, Pneumokokus, Rotavirus, Japanese Ensephalitis, dan HPV (*Human Papilloma Virus*). Seorang anak bisa dinyatakan memperoleh imunisasi lengkap apabila telah mendapatkan satu kali imunisasi BCG, tiga kali imunisasi DPT, tiga kali imunisasi polio, satu kali imunisasi campak dan tiga kali imunisasi hepatitis B.

Dalam kurun waktu 2016 sampai dengan 2018 (gambar 2.2) terjadi peningkatan terhadap cakupan imunisasi BCG. Hal tersebut menunjukkan bahwa bayi-bayi yang baru lahir telah diberikan tameng awal untuk memulai kehidupannya dengan intervensi medis. Diharapkan kematian bayi dapat ditekan dengan meningkatnya capaian imunisasi BCG. Akan tetapi, capaian imunisasi lanjutan untuk balita perlu ditingkatkan lagi karena persentasenya semakin menurun setiap tahunnya. Diharapkan seorang balita dapat terpenuhi kebutuhan imunisasi wajib dan imunisasi pilihan sehingga derajat kesehatan mereka akan meningkat. Dengan kesehatan yang prima anak-anak akan tumbuh menjadi generasi cerdas dan berbakat.

PEMANFAATAN FASILITAS TENAGA KESEHATAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan Nomor 47 Tahun 2016 tertuang bahwa fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Hal ini mengisyaratkan bahwa masalah kesehatan tidak hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga mengikutsertakan peran dari daerah dan masyarakat. Kondisi tersebut terlihat dari persentase penduduk yang berobat jalan di Kabupaten Cilacap paling banyak adalah praktek dokter/bidan yaitu sebesar 21 persen di tahun 2018 dan 22 persen pada tahun berikutnya. Dipilihnya fasilitas kesehatan ini karena faktor akses yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan keberadaannya yang tersebar di seluruh wilayah. Selain itu prosedur pelayanannya relatif lebih mudah bila dibandingkan dengan rumah sakit.

Gambar 2.3 Persentase penduduk yang sakit dan berobat jalan menurut fasilitas berobat jalan di kabupaten Cilacap, 2018-2019



Sumber: Susenas

Dari hasil Susenas, pengobatan tradisional masih menjadi alternatif pengobatan yang dituju oleh masyarakat meskipun persentasenya kecil (1 persen). Masyarakat sudah lebih familiar dengan pengobatan medis yang ada di Kabupaten

Cilcap. Terlebih setelah adanya program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang juga melayani kalangan masyarakat miskin untuk dapat berobat gratis. Peran penjaminan kesehatan masyarakat melalui BPJS membuka akses bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan premi yang terjangkau semua kalangan masyarakat. Namun kendati demikian kesadaran untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyakit secara preventif yang utama agar terwujud masyarakat yang sejahtera.

<https://cilacapkab.bps.go.id>

PENDIDIKAN CILACAP

“Mencerdaskan kehidupan bangsa” merupakan kalimat yang sering kita dengar saat pembacaan pembukaan Undang – Undang Dasar (UUD) 1945. Satu satunya cara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa adalah dengan pendidikan baik itu pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Pendidikan merupakan hak segala bangsa, sebagaimana dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, ayat (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya. Dalam hal ini pemerintah wajib membiayai pendidikan formal atau melalui sekolah



Sumber gambar: all-freedownload.com

Sekolah merupakan salah satu sarana dalam pelaksanaan pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 18 tentang pendidikan nasional, sekolah adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal yang terdiri atas, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Lembaga pendidikan adalah kunci bagi setiap warga negara untuk mendapat hak dan kewajiban dalam memperoleh ilmu.

Tabel 3.1 Rata-rata lama sekolah (tahun) dan harapan lama sekolah (tahun) di Kabupaten Cilacap, 2017-2019

Indikator pendidikan	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata lama sekolah	6.91	6.92	6.93
Laki-laki	7.4	7.41	7.42
Perempuan	6.44	6.45	6.47
Harapan lama sekolah	12.3	12.48	12.49
Laki-laki	12.91	12.92	12.93
Perempuan	12.16	12.45	12.48

Sumber: IPM

Secara umum di kabupaten Cilacap, rata – rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun keatas pada tahun 2019 sebesar 6.93 Tahun. Secara umum penduduk Kabupaten Cilacap baru mampu menempuh pendidikan sampai dengan kelas 1 SMP atau putus sekolah di kelas 1 SMP. Jika dibandingkan dengan tahun 2017, maka rata-

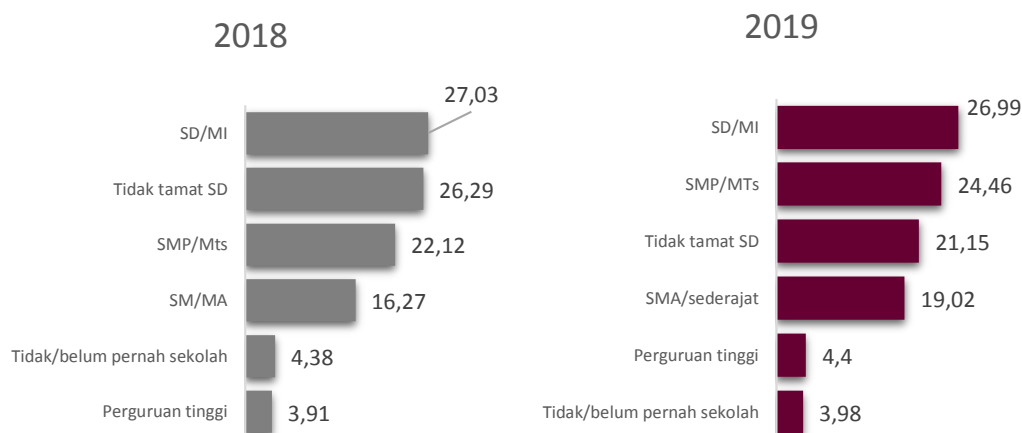
rata lama sekolah semakin meningkat setiap tahunnya. Meningkatnya rata-rata lama sekolah tidak lepas dari upaya pemerintah maupun masyarakat yang menginginkan untuk mendorong kualitas pendidikan makin baik. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, rata-rata lama sekolah laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa rata rata pendidikan laki- laki dan perempuan terpaut 1 tahun.

Indikator pendidikan lainnya adalah Harapan Lama Sekolah (HLS). Indikator ini mengukur peluang pendidikan yang dapat diperoleh untuk anak usia sekolah atau usia 7 tahun keatas. HLS Kabupaten Cilacap pada tahun 2019 sebesar 12.49 tahun. Artinya anak usia 7 tahun keatas akan mempunyai peluang bersekolah sampai 12 tahun atau sampai lulus SLTA. Sama seperti rata – rata lama sekolah, angka HLS ini setiap tahunnya semakin meningkat. HLS laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan yang mengindikasikan peluang laki-laki untuk memperoleh pendidikan yang layak lebih besar ketimbang perempuan.

PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN

Selain indikator rata-rata lama sekolah dan HLS, kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari ketrampilan serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya yang dapat digambarkan dari tingkat pendidikan yang telah ditamatkan.

Gambar 3.1 *Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas menurut jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kabupaten Cilacap, 2018-2019*

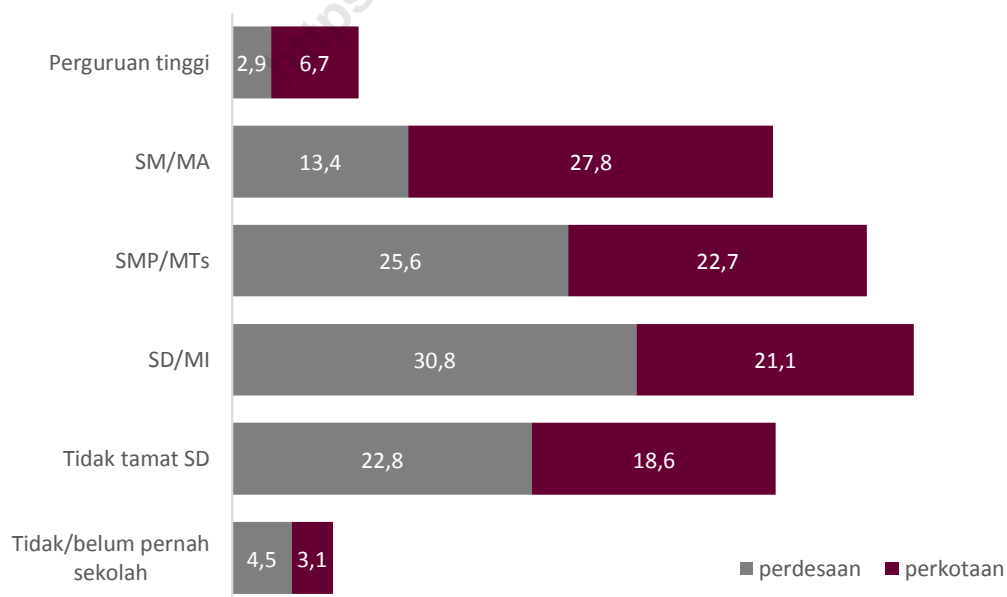


Sumber: Susenas

Pendidikan yang ditamatkan merupakan salah satu ukuran kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat maka semakin tinggi juga kesejahteraannya. Gambar 3.1 menyajikan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Besaran penduduk yang tamat SD/MI, SMP/MTs, dan tidak tamat SD berturut-turut adalah sebesar 26,99 persen; 24,46 persen, dan 21,15 persen. Sementara itu, persentase penduduk yang tamat Perguruan Tinggi mencapai sebesar 3,98 persen. Seperti yang diharapkan oleh banyak pihak, persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang lulus SMA dan perguruan tinggi meningkat dari tahun 2018 ke 2019.

Pendidikan yang ditamatkan untuk penduduk perdesaan dan perkotaan juga memiliki perbedaan. Masyarakat di perkotaan lebih peduli terhadap pendidikan sehingga jenjang pendidikan perguruan tinggi menjadi prioritas bagi mereka. Sebanyak 6,7 persen masyarakat di wilayah perkotaan Cilacap merupakan lulusan perguruan tinggi. Sebaliknya, masyarakat perdesaan banyak yang mencukupkan diri dengan pendidikan dasar saja yaitu SD sampai SMP dimana lulusan SD sebesar 31 persen dan lulusan SMP 26 persen.

Gambar 3.2 Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas menurut klasifikasi wilayah dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kabupaten Cilacap tahun 2019



Sumber: Susenas

ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun, meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

Tabel 3.2 Angka Partisipasi Sekolah menurut usia sekolah dan jenis kelamin di Kabupaten Cilacap, 2018-2019

Kelompok umur	2018			2019		
	Laki-laki (L)	Perempuan (P)	L+P	Laki-laki (L)	Perempuan (P)	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7-12	99,39	100,00	99,70	99,51	100,00	99,73
13-15	96,94	99,32	97,38	94,43	100,00	97,27
16-18	60,95	76,65	68,12	61,44	75,73	68,23
19-24	24,12	18,91	21,56	23,18	18,31	20,87

Sumber: Susenas

Berdasarkan data Susenas, terjadi peningkatan APS secara umum dari tahun 2018 ke 2019. APS untuk kelompok usia 7-12 tahun nilainya hampir mencapai 100 persen baik laki – laki maupun perempuan. APS pada kelompok usia 13-15 tahun terjadi penurunan APS pada jenis kelamin laki-laki. Sedangkan pada jenis kelamin perempuan terjadi peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran perempuan untuk melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan menengah mengalami peningkatan. Secara umum APS pada kelompok umur 19-24 tahun mengalami penurunan dari tahun 2018 ke 2019. Lebih banyak laki-laki pada kelompok usia ini yang melanjutkan pendidikan khususnya pada perguruan tinggi dibandingkan dengan perempuan.

Sama halnya dengan APS, Angka Partisipasi Murni (APM) secara rata – rata mengalami peningkatan dari tahun 2018 – 2019 pada jenjang SMP/ sederajat dan perguruan tinggi.

Tabel 3.3 Angka Partisipasi Murni (APM) menurut usia sekolah dan jenis kelamin di Kabupaten Cilacap, 2018-2019

Tingkatan pendidikan	2018			2019		
	Laki-laki (L)	Perempuan (P)	L+P	Laki-laki (L)	Perempuan (P)	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SD/ sederajat	98,76	100,00	99,39	98,62	98,83	98,71
SMP/ sederajat	78,48	87,98	82,52	77,16	91,34	84,39
SMA/ sederajat	52,73	69,15	60,23	51,64	68,85	59,82
Perguruan tinggi	7,20	7,45	7,32	8,51	7,52	8,04

Sumber: Susenas

Jika dilihat menurut jenis kelamin, APM tahun 2019 pada tingkatan pendidikan SD/sederajat mengalami penurunan dari tahun 2018. Hal tersebut terjadi baik pada laki-laki maupun perempuan. Peningkatan justru terjadi pada jenjang perguruan tinggi. APM mengalami peningkatan yang signifikan baik pada laki-laki maupun perempuan. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan tinggi mulai terlihat. Perempuan juga diberikan kesempatan untuk ikut mengenyam pendidikan di perguruan tinggi.

KETENAGAKERJAAN CILACAP

Ketenagakerjaan menurut Undang Undang nomor 13 tahun 2013 bukan hanya sebatas kegiatan pada masa kerja saja. Menurut peraturan tersebut ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja yang dimaksud disini didefinisikan sebagai setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang dan/atau jasa yang berguna bagi dirinya sendiri ataupun masyarakat secara umum. Peraturan tersebut juga mengatur tentang tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia. Syarat penting yang harus dimiliki warga asing yang bekerja di Indonesia adalah memiliki visa kerja.



Sumber gambar: VectorStock.com

Dalam perencanaan pembangunan, data mengenai ketenagakerjaan memegang peranan penting. Tanpa tenaga kerja maka tidak mungkin program pembangunan dapat dilaksanakan. Ketersediaan data ketenagakerjaan yang semakin lengkap dan tepat akan memudahkan pemerintah dalam membuat rencana pembangunan mengingat jumlah dan komposisi tenaga kerja selalu mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi.

Konsep ketenagakerjaan yang digunakan oleh BPS adalah *The Labor Force Concept* merujuk pada rekomendasi *International Labour Organization* (ILO). Konsep ini membagi penduduk menjadi dua kelompok yaitu penduduk usia kerja dan bukan usia kerja. Selanjutnya, penduduk usia kerja dibedakan pula menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang dilakukan yakni angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri dari dua bagian yaitu bekerja dan pengangguran. Sementara bukan angkatan kerja mencakup sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya. Secara alamiah pertumbuhan angkatan kerja searah dengan pertumbuhan penduduk. Namun demikian pertumbuhan penciptaan lapangan kerja yang baru berjalan lebih lambat dibandingkan pertumbuhan penduduk usia kerja. Hal ini mengakibatkan tidak semua angkatan kerja terserap oleh pasar kerja, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara penawaran kerja dan permintaan tenaga kerja. Ketidakseimbangan tersebut akan menciptakan persoalan ketenagakerjaan yaitu pengangguran.

Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai keadaan angkatan kerja di Kabupaten Cilacap. Beberapa indikator yang dianalisa mencakup Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), penduduk bekerja dan pekerja anak. Sumber data penghitungan indikator ini diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).

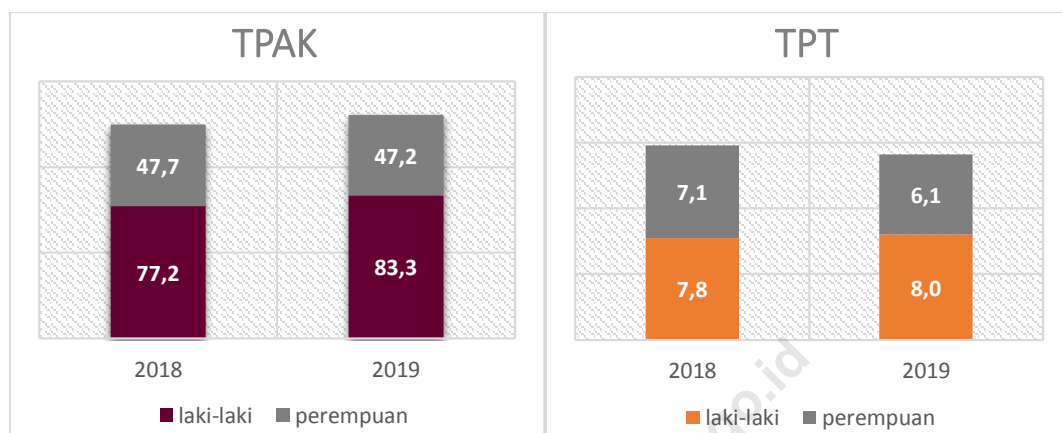
TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)

Keterlibatan penduduk yang aktif dalam kegiatan ekonomi diukur dari banyaknya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang masuk dalam pasar kerja, baik mereka yang statusnya bekerja atau yang mencari pekerjaan (menganggur). Indikator yang digunakan untuk mengukur besaran tersebut adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi. Indikator ini diperoleh dari perbandingan angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.

Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja juga dikenal indikator yang digunakan untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan. Termasuk juga mereka yang baru mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dihitung dari perbandingan antara banyaknya jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja.

Dari gambar 4.1 terjadi peningkatan TPAK yang signifikan untuk laki-laki, sedangkan untuk perempuan sedikit mengalami penurunan. Bertambahnya jumlah angkatan kerja harus dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku usaha untuk mendapatkan pekerja yang berkualitas dan murah. Dengan adanya tenaga kerja yang terjangkau maka roda perekonomian dapat bergerak dengan cepat. Jika dilihat dari TPT, pengangguran laki-laki juga mengalami kenaikan selama kurun waktu 2018 sampai dengan 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi ketidakseimbangan antara ketersediaan lapangan pekerjaan dan penduduk yang berusaha mendapatkan pekerjaan. Lapangan pekerjaan yang tersedia lebih kecil daripada pencari kerja.

Gambar 4.1 Tingkat Partipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka, 2018-2019

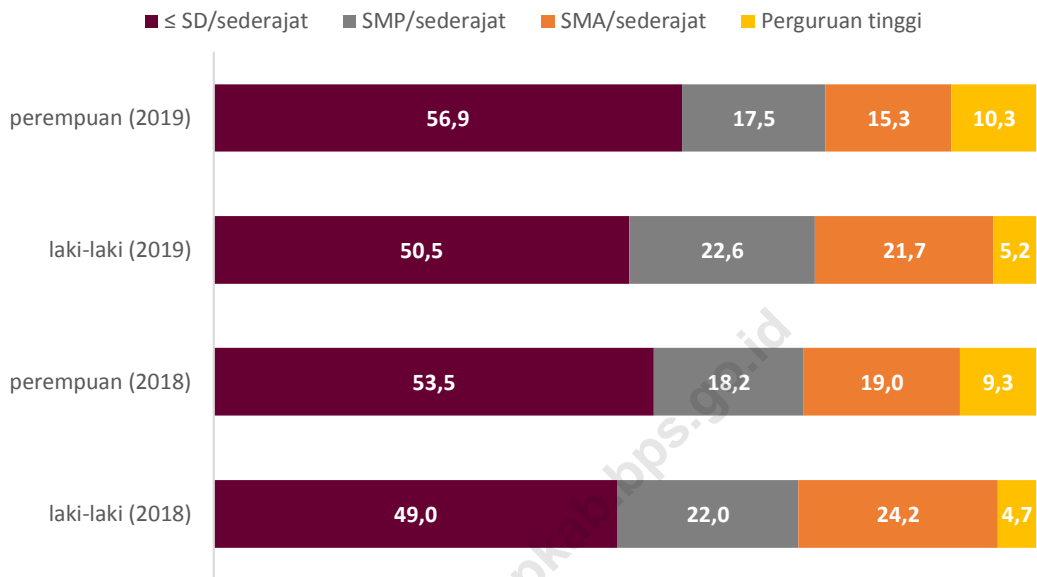


Sumber: Sakernas

Pendidikan yang tinggi merupakan jembatan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dengan pendapatan besar. Hampir semua orang berkeinginan bekerja dengan penghasilan yang tinggi. Untuk itu mereka berupaya dengan memperoleh pendidikan tinggi yang berkualitas. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Namun, keterbatasan lapangan kerja yang tersedia menyebabkan mereka tidak terserap pada lapangan usaha yang sesuai dengan tingkat pendidikan dan keahliannya.

Sebagian besar penduduk Kabupaten Cilacap yang bekerja memiliki tingkat pendidikan yang rendah yaitu tamatan SD dan SMP. Hal tersebut terjadi baik pada pekerja laki-laki maupun perempuan. Dengan tingkat pendidikan yang rendah, para pekerja tidak memiliki kesempatan untuk memilih pekerjaan. Mereka cenderung bekerja serabutan dengan upah yang minim. Pekerja dengan tingkat keahlian yang tinggi membutuhkan latar belakang pendidikan yang tinggi pula. Persentase pekerja dengan latar belakang pendidikan universitas persentasenya hanya 10 persen untuk perempuan. Bahkan nilai untuk laki-laki hanya berkisar 5 persen di tahun 2019. Lebih banyak pekerja laki-laki yang berpendidikan rendah sehingga pekerjaan yang dimiliki menghasilkan pendapatan yang minim. Pada tahun 2019 sebanyak 28 persen laki-laki merupakan pekerja bebas dan pekerja tidak dibayar.

Gambar 4.2 Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin di Kabupaten Cilacap, 2018-2019

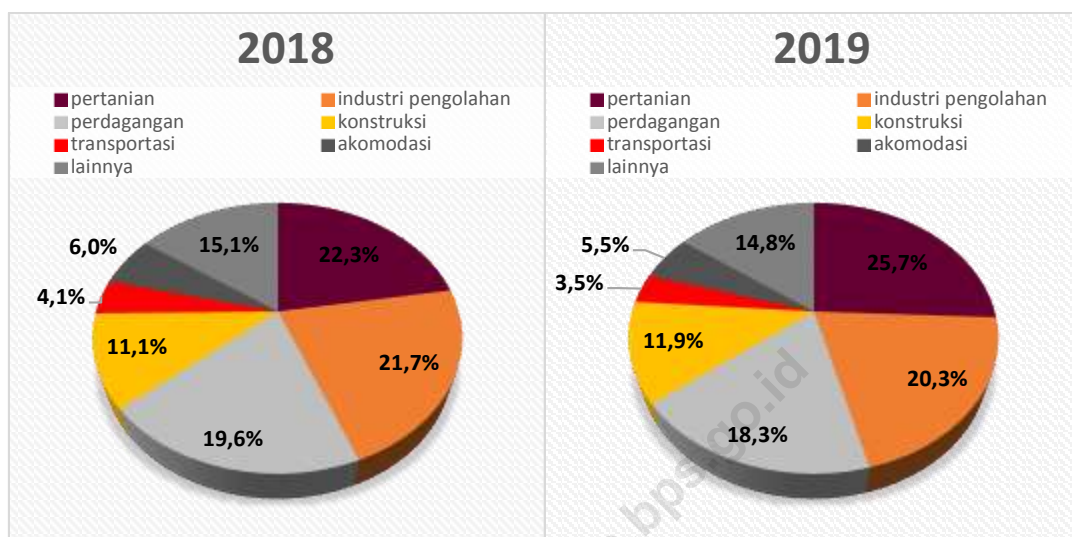


Sumber: Sakernas

LAPANGAN PEKERJAAN DAN STATUS PEKERJAAN

Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha merupakan salah satu ukuran untuk melihat potensi ekonomi dalam melihat penyerapan tenaga kerja. Ukuran ini memberikan gambaran sektor mana yang dominan menyerap tenaga kerja dan sebaliknya. Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha pada publikasi ini dikelompokkan menjadi 7 sektor lapangan usaha yaitu: pertanian, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, transportasi, akomodasi, dan lainnya. Kategori lainnya meliputi: pertambangan dan penggalian, listrik dan gas, penyediaan air, informasi komunikasi, keuangan, *real estate*, jasa perusahaan, pemerintahan, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa-jasa lainnya.

Gambar 4.3 Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan usaha di Kabupaten Cilacap, 2018 dan 2019



Sumber: Sakernas

Mayoritas penduduk Kabupaten Cilacap bekerja di sektor pertanian. Produksi pertanian di Cilacap memegang peringkat pertama di Jawa Tengah, khususnya produksi padi dan palawija. Banyak dari penduduk yang menggantungkan hidupnya dari sektor tersebut. Industri pengolahan menjadi pilihan kedua bagi masyarakat dalam mencari mata pencaharian. Banyak perusahaan industri yang berdiri di wilayah Cilacap sehingga mampu menyerap tenaga kerja lokal. Perusahaan tersebut diantaranya: Pertamina Unit Pengolahan IV Cilacap, semen Solusi Bangun Indonesia, pengalangan tuna Juifa, pengawetan udang Toxindo, dan masih banyak lainnya.

PEKERJA MENURUT USIA

Secara umum pekerja di Kabupaten Cilacap terkonsentrasi pada kelompok usia produktif, yaitu rentang usia 25 sampai dengan 54 tahun. Penduduk pada kelompok usia tersebut merupakan tulang punggung keluarga sehingga memang harus aktif bekerja untuk memperoleh pendapatan. Kelompok penduduk lanjut usia juga masih ikut mendominasi sebaran pekerja di Cilacap. Sebanyak 23 persen penduduk berusia lebih dari 55 tahun masih aktif bekerja untuk memperoleh penghasilan.

Penduduk usia muda usia 15 sampai dengan 24 tahun yang bekerja sebanyak 12 persen. Terdapat pekerja usia muda baik pada penduduk laki-laki maupun

perempuan. Pekerja yang berada pada kelompok muda tersebut merupakan pekerja baru yang minim pengalaman. Kebanyakan dari mereka adalah *fresh graduate* yang seharusnya memiliki ketrampilan lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya. Penyerapan tenaga kerja muda mengalami peningkatan dimana pada tahun 2019 berhasil menyerap 12 persen pekerja.

Tabel 4.1 Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Cilacap, 2018-2019

Golongan Umur	2018			2019		
	Laki-laki (L)	Perempu an (P)	L+P	Laki-laki (L)	Perempu an (P)	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(8)	(9)	(10)
15– 24	11,15	13,49	11,65	13,81	13,18	12,06
25 – 54	64,43	64,37	62,88	62,05	62,66	64,40
55 +	24,42	22,14	25,47	24,14	24,16	23,54
Jumlah	100	100	100	100	100	100

Sumber: Sakernas

TARAF & POLA KONSUMSI CILACAP



Sumber gambar: all-free-download.com

Konsumsi adalah salah satu aspek yang mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Tingkat konsumsi yang tinggi akan mendorong kegiatan ekonomi yang lain yaitu produksi. Semakin tinggi tingkat produksi barang dan jasa maka akan semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Selain itu, pola konsumsi masyarakat juga menunjukkan tingkat kesejahteraannya. Masyarakat dengan kesejahteraan yang tinggi cenderung mengeluarkan biaya untuk komoditas bukan makanan lebih besar dibandingkan dengan biaya untuk makanan.

Pengeluaran rumah tangga

Pengeluaran rumah tangga dibagi menjadi dua yaitu pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan rumah tangga akan menggeser pola konsumsinya. Semakin tinggi pendapatan maka semakin tinggi pula pengeluaran untuk komoditas bukan makanan. Hal ini disebabkan oleh konsumsi makanan yang sifatnya terbatas sehingga kelebihan pendapatan akan digunakan oleh masyarakat untuk mengkonsumsi komoditas selain makanan, menabung, maupun investasi.

Tabel 5.1 Rata-rata pengeluaran per kapita menurut jenisnya di Kabupaten Cilacap, 2017-2019

Jenis pengeluaran	Nominal (Rp)		
	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
Makanan	403.523	416.371	435.509
Bukan makanan	361.015	386.610	435.877
-Perumahan dan fasilitas rumah tangga	162.240	178.116	200.016
-Aneka barang dan jasa	92.131	107.616	106.338
-Pakaian, alas kaki dan tutup kepala	20.758	21.540	23.445
-Barang tahan lama	52.058	49.752	53.388
-Pajak, pungutan, dan asuransi	20.217	19.342	24.186

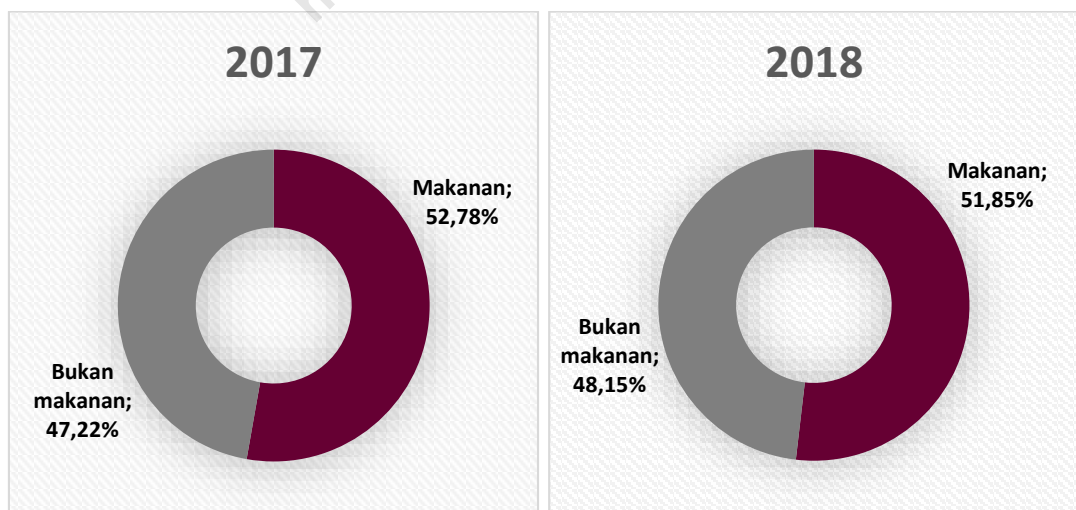
Jenis pengeluaran	Nominal (Rp)		
	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
-Keperluan pesta dan upacara/kenduri	13.646	10.244	28.503
Total	764.539	802.981	871.386

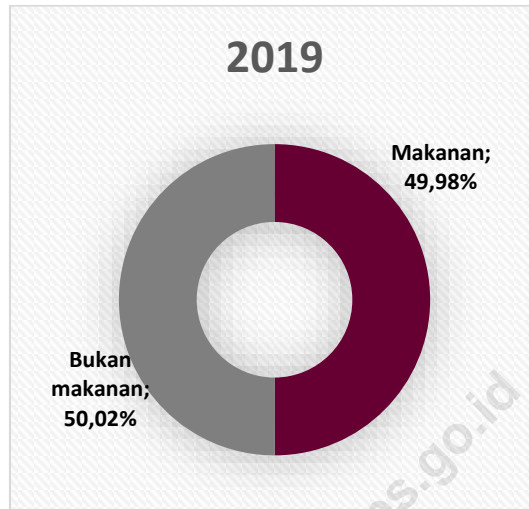
Sumber: Susenas

Pengeluaran per kapita di Kabupaten Cilacap meningkat selama tiga tahun terakhir, baik pengeluaran untuk makanan maupun bukan makanan. Kenaikan tersebut mencapai 8 persen pada tahun 2019. Kenaikan pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan besarnya hampir sebanding.

Kenaikan pengeluaran makanan salah satunya disebabkan oleh fluktuasi harga bahan makanan. Harga bahan-bahan makanan yang melonjak menjadi salah satu penyebab kenaikan tersebut. Untuk pengeluaran bukan makanan, kenaikan paling tinggi dialami untuk pengeluaran pesta dan upacara/kenduri. Selain itu, pengeluaran untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga merupakan tertinggi kedua. Harga tanah dan bangunan di wilayah Cilacap semakin mahal. Penyebabnya adalah semakin banyak penduduk yang bermigrasi masuk ke Cilacap terutama para pekerja dengan adanya beberapa mega proyek seperti: Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kesugihan dan pembangunan kilang minyak baru Pertamina. Para migran masuk membutuhkan fasilitas tempat tinggal sehingga permintaan terhadap perumahan meningkat.

Gambar 5.1 Proporsi pengeluaran rumah tangga di Kabupaten Cilacap, 2017-2019



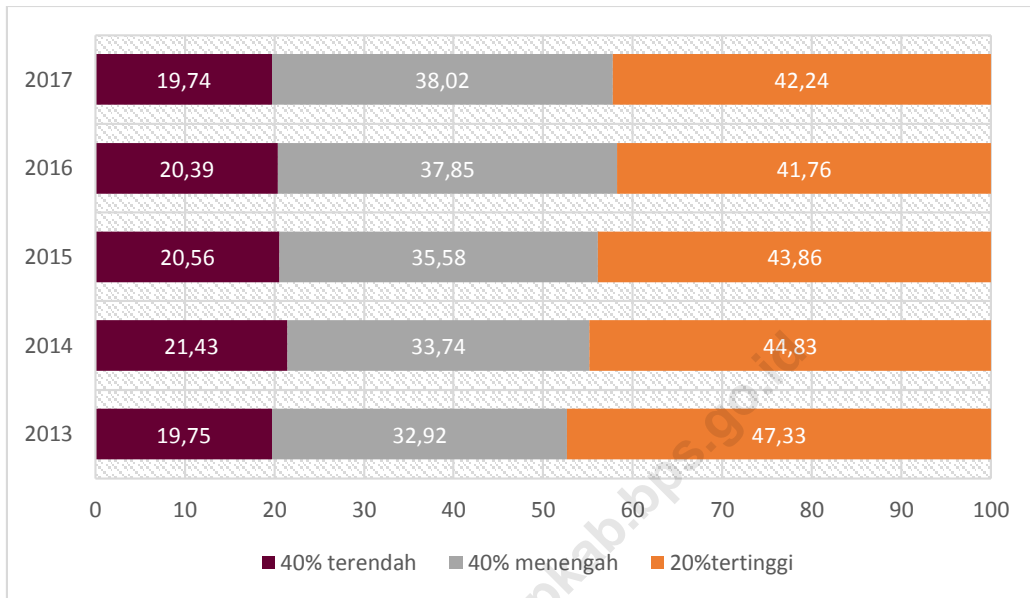


Sumber: Susenas

Proporsi pengeluaran makanan selalu mendominasi pengeluaran penduduk di Kabupaten Cilacap. Namun, pada tahun 2019 terdapat pola yang berbeda seperti yang terlihat pada gambar 5.1. Pengeluaran bukan makanan lebih dominan dibandingkan pengeluaran makanan. Kenaikan signifikan dipengaruhi dari pengeluaran pesta dan perumahan. Perubahan pola tersebut mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fokus pengeluaran rumah tangga tidak hanya pada pemenuhan kebutuhan makan.

Indikator lain yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan penduduk adalah dengan menggunakan kriteria Bank Bank Dunia. Berdasarkan kriteria tersebut penduduk digolongkan menjadi tiga kelas yaitu: 40 persen berpendapatan rendah, 40 persen berpendapatan sedang, dan 20 persen berpendapatan tinggi. Kelas yang menjadi fokus perhatian adalah penduduk 40 persen berpendapatan rendah. Jika mereka memperoleh lebih dari 17 persen pendapatan maka tingkat ketimpangan pendapatan dianggap rendah.

Gambar 5.2 Distribusi pembagian pengeluaran per kapita di kabupaten Cilacap, 2013-2017



Sumber: Susenas

Konsumsi kalori dan protein

Konsumsi kalori dan protein dapat dijadikan indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Jumlah konsumsi kalori dan protein dihitung berdasarkan perkalian kuantitas makanan yang dikonsumsi dengan besarnya kandungan kalori dan protein dalam setiap makanan tersebut. Angka kecukupan gizi yang dianjurkan bagi penduduk Indonesia adalah konsumsi kalori sebesar 2150 kkal dan 57 gram protein.

Tabel 5.2 Konsumsi energi dan protein per kapita per hari menurut daerah tempat tinggal di kabupaten Cilacap, 2017-2019

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Energi (kkal)			
2017	2044,91	2046,83	2046,10
2018	2006,96	2047,63	2031,71
2019	1942,47	1960,96	1953,72
Protein (gram)			
2017	57,86	55,20	56,21
2018	55,43	53,63	54,33
2019	54,29	52,07	52,94

Sumber: Susenas

Berdasarkan data tiga tahun terakhir, kecukupan gizi penduduk Cilacap baik kebutuhan kalori maupun protein belum memenuhi standar yang sudah ditentukan. Standar yang digunakan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 75 tahun 2013 dimana angka kecukupan energi sebesar 2150 kalori dan protein sebesar 57 gram. Konsumsi energi penduduk perkotaan lebih kecil dibandingkan penduduk perdesaan. Mereka cenderung lebih banyak mengonsumsi protein karena ketersediaan pangan yang lebih beragam di perkotaan. Konsumsi masyarakat perdesaan lebih ke makanan pokok yang mudah dijangkau oleh mereka.

PERUMAHAN CILACAP

Rumah adalah salah satu kebutuhan pokok manusia yang paling penting. Pemenuhan atas kebutuhan tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga pemerintah. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Demikian pula dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU-PKP) menyatakan bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui peyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di wilayah Indonesia. Pemenuhan hak atas perumahan sebagai hak dasar berasal dari keberlangsungan hidup dan menjaga martabat kehidupan manusia.



Sumber gambar: freepik.com

Pemenuhan kebutuhan rumah juga tertuang dalam kesepakatan internasional SDGs (Sustainable Development Goals) 2030. Pada tujuan ke enam terfokus pada upaya ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi layak yang berkelanjutan untuk semua lapisan masyarakat. Pada tujuan ke tujuh fokus pada energi bersih dan terjangkau, dengan akses yang terjangkau pula, andal, berkelanjutan, modern untuk semua. Tujuan ke sebelas fokus pada kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.

Perumahan merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Rumah selain sebagai rumah tinggal juga menunjukkan status sosial seseorang. Semakin baik status sosialnya maka semakin baik pula pemenuhan kebutuhannya.

Gambaran perumahan di Indonesia

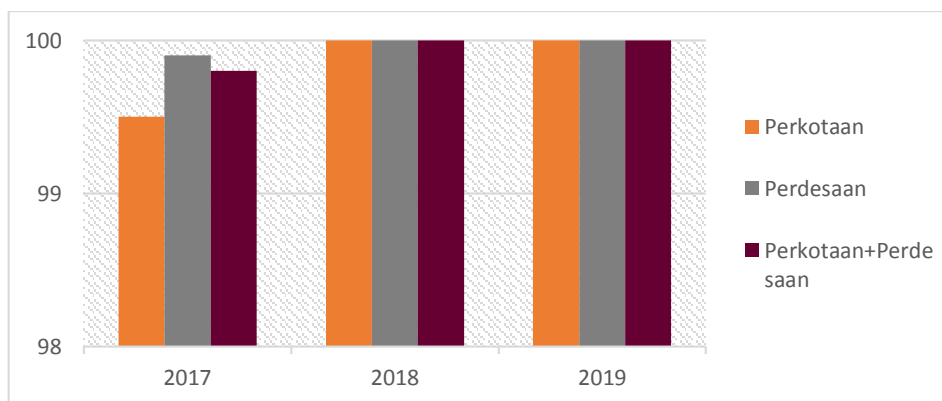
Pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat Indonesia cukup baik. Lebih dari 80 persen rumah tangga menempati rumah milik sendiri. Akan tetapi, dalam kurun

waktu tiga tahun terakhir persentasenya semakin menurun. Harga rumah dan tanah yang semakin melonjak menjadi penyebabnya. Menurut catatan perhimpunan pengusaha Real Estate Indonesia (REI), kenaikan harga rumah di kota besar mencapai 10-30 persen. Angka tersebut melebihi angka inflasi nasional yang berkisar 5 persen setiap tahunnya. Tingginya kenaikan harga rumah membuat masyarakat lebih memilih sewa atau kontrak untuk menghemat biaya. Ataupun kalau membeli rumah dengan kualitas yang seadanya sesuai dengan uang yang dimiliki. Padahal, pemenuhan kebutuhan rumah yang layak harus melihat dari tiga aspek yaitu: kondisi bangunan, fasilitas perumahan, dan kesehatan lingkungannya.

Kondisi fisik bangunan

Kondisi fisik bangunan yang menjadi komponen utama rumah adalah jenis atap, jenis dinding, jenis lantai, dan luas lantai. Atap merupakan bagian dari struktur bangunan tempat tinggal yang berfungsi sebagai penutup secara langsung dari gangguan hujan, sinar matahari, dan angin. Kriteria atap rumah yang layak adalah terbuat dari material beton/genteng/asbes/seng/bambu/kayu. Berdasarkan data Susenas, material atap yang ada di wilayah Kabupaten Cilacap sudah layak dimana genteng tanah liat mendominasi jenis material atap. Pasokan genteng tanah liat dari wilayah tetangga (Kabupaten Kebumen) membuat jenis material ini selalu tersedia dan terjangkau untuk semua lapisan masyarakat Cilacap. Selain itu, pengaruh modernisasi terhadap struktur bangunan rumah di Cilacap juga mulai terasa. Sekitar 1 persen rumah tangga di Cilacap, baik daerah perkotaan maupun perdesaan, sudah menggunakan atap beton yang harga dan kualitasnya jauh lebih tinggi dibandingkan genteng tanah liat.

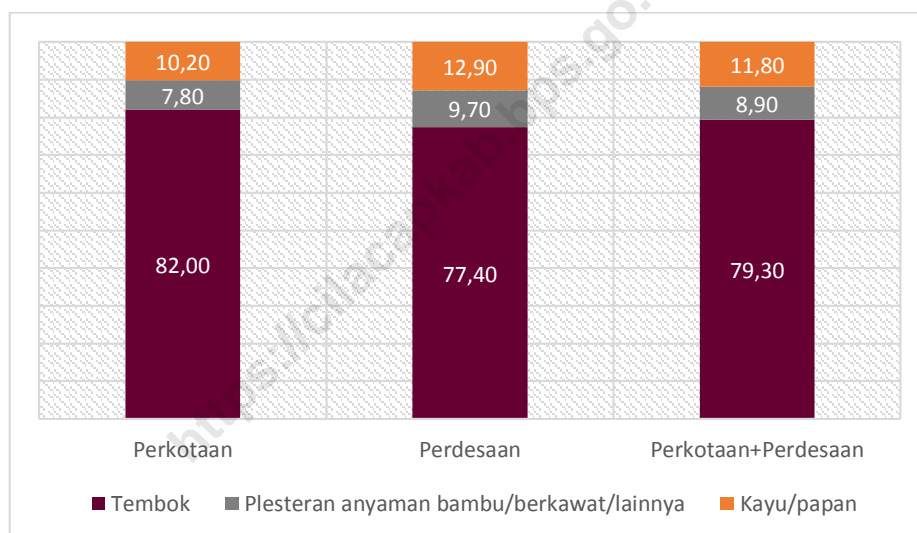
Gambar 6.1 Persentase rumah dengan atap layak, Kabupaten Cilacap 2017-2019



Sumber: Susenas

Komponen utama rumah berikutnya adalah jenis dinding. Dinding dikatakan memenuhi syarat kelayakan jika bersifat tidak lembab dan tidak mudah ditembus angin. Jenisnya yaitu dinding yang terbuat dari tembok atau kayu. Lebih dari 80 persen perumahan di Cilacap sudah memiliki dinding yang layak. Sebagian besar memakai jenis dinding tembok baik di perkotaan maupun perdesaan. Akan tetapi, tingkat kelayakan tersebut masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan rata-rata provinsi Jawa Tengah. Tingkat kelayakan rumah dari segi dinding untuk provinsi Jawa Tengah sudah bertengger di kisaran 90 persen. Di Kabupaten Cilacap masih banyak masyarakat yang menggunakan dinding dari anyaman bambu, khususnya di wilayah perdesaan.

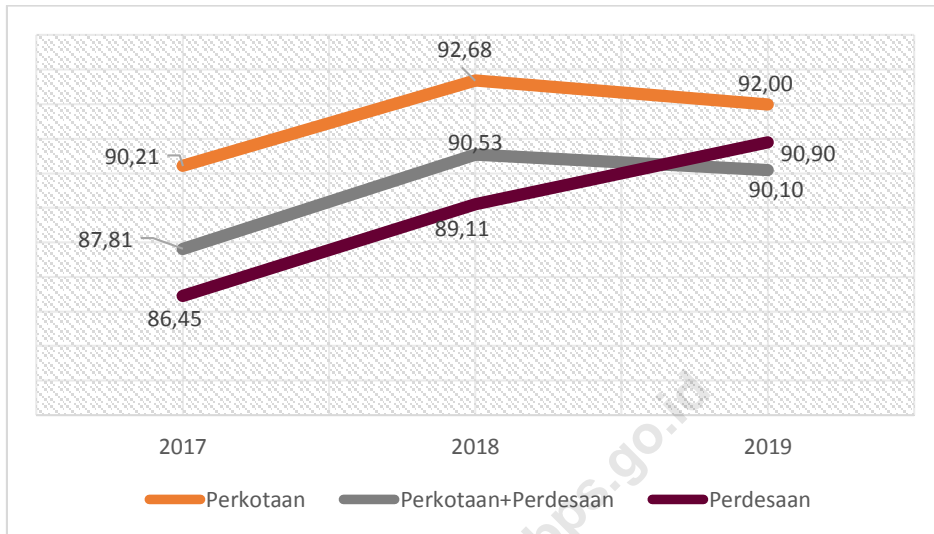
Gambar 6.2 Persentase rumah menurut jenis dinding, Kabupaten Cilacap 2019



Sumber: Susenas

Indikator kelayakan dari sebuah rumah dilihat pula dari jenis lantai yang digunakan. Rumah dianggap layak huni jika lantainya terbuat dari material selain tanah, seperti: maremer/granit, keramik, parket/vinil/karpet, ubin/tegel/teraso, kayu/papan, semen/bata merah, dan bambu. Persentase rumah dengan lantai layak di Kabupaten Cilacap terus meningkat selama tiga tahun terakhir, terutama di daerah perdesaan. Masyarakat perdesaan mulai mempunyai kemampuan ekonomi untuk membangun rumah dengan lantai yang layak.

Gambar 6.3 Persentase rumah berlantai layak, Kabupaten Cilacap 2017-2019



Sumber: Susenas

Selain dari jenisnya, kelayakan lantai rumah juga dilihat dari luasannya. Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), ukuran luas lantai yang ideal digunakan per orang adalah minimal 10 meter persegi. Luas lantai yang sempit dapat mengurangi konsumsi oksigen penghuni rumah serta mempercepat proses penularan penyakit. Untuk kondisi Kabupaten Cilacap lebih dari 90 persen perumahan yang ada sudah memenuhi standar kelayakan luas lantai yaitu lebih dari 10 meter persegi per orangnya. Hal ini dapat dilihat secara rinci pada tabel 6.1 berikut.

Tabel 6.1 Persentase rumah tangga menurut luas lantai per kapita, 2017-2019

Luas lantai per kapita	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<= 7,2 m ²	0,64	3,28	1,75	0,79	1,68	1,34	0,73	2,32	1,50
7,3-9,9 m ²	5,27	4,04	3,75	4,71	3,85	3,00	4,91	3,93	3,30
>= 10 m ²	94,09	92,68	94,50	94,50	94,47	95,70	94,35	93,76	95,20

Sumber: Susenas

Fasilitas perumahan

Sesuai dengan perkembangan zaman, rumah tidak lagi sekedar sebagai tempat berlindung tetapi juga mendukung kesehatan orang-orang yang tinggal di dalamnya. Rumah yang layak huni akan meningkatkan derajat kesehatan penghuninya. Selain dari kondisi fisik bangunan, fasilitas perumahan juga mencerminkan tingkat kelayakan hunian. Fasilitas tersebut meliputi: sumber air minum, sumber penerangan dan tempat buang air besar yang digunakan.

Penyediaan air bersih merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara. Hal tersebut tertuang jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 ayat 3 yang berbunyi “Bumi dan air dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan unuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Pemenuhan kebutuhan air minum di Kabupaten Cilacap cukup memadai. Pada tahun 2019 lebih dari 90 persen penduduk memiliki kecukupan air minum. Masyarakat Cilacap memilih sumber air minum dari air kemasan bermerk dan air isi ulang dimana persentasenya mencapai lebih dari 20 persen. Kedua jenis sumber air minum tersebut semakin meningkat penggunaannya oleh masyarakat Cilacap karena dianggap lebih praktis dan higienis.

Selain air minum, fasilitas perumahan yang penting adalah sumber penenrangan. Sumber penerangan ideal adalah yang berasal dari listrik (baik dari PLN/Perusahaan Listrik Negara maupun Non PLN). Cahaya listrik lebih terang dibandingkan sumber penerangan lainnya. Semakin baik penerangan rumah maka semakin baik pula tingkat kehidupan penghuni-penghuni di dalamnya. Mereka dapat melakukan aktivitas baik di siang maupun malam hari. Lebih dari 99 persen rumah di wilayah Kabupaten Cilacap sudah memakai penerangan listrik, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan.

Penggunaan jamban juga menjadi salah satu kriteria dalam penentuan fasilitas rumah yang baik. Jamban yang dimiliki sendiri oleh rumah tangga dengan pembuangan *septik tank* menjadi kriteria terbaik untuk fasilitas pembuangan air besar. Pada tahun 2019 di kabupaten Cilacap 93 persen perumahan sudah memenuhi kriteria tersebut. Akan tetapi, penyediaan jamban yang layak harus lebih ditingkatkan terutama di daerah perdesaan karena masih banyak penduduk yang menggunakan jamban bersama dengan tempat pembuangan akhir di kolam/sawah/sungai/danau/laut. Dengan meningkatkan kualitas pembuangan akhir diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mengurangi angka kesakitan. Angka ksakitan di Kabupaten Cilacap termasuk tinggi yaitu berada pada kisaran 30 persen selama tiga tahun terakhir.

Tabel 6.2 Persentase rumah tangga menurut beberapa fasilitas perumahan di Kabupaten Cilacap tahun 2019

Fasilitas perumahan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+ perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Penerangan listrik	99,8	99,8	99,8
Air minum kemasan	33,0	15,9	22,7
Jamban sendiri dengan septik tank	96,4	91,5	93,6

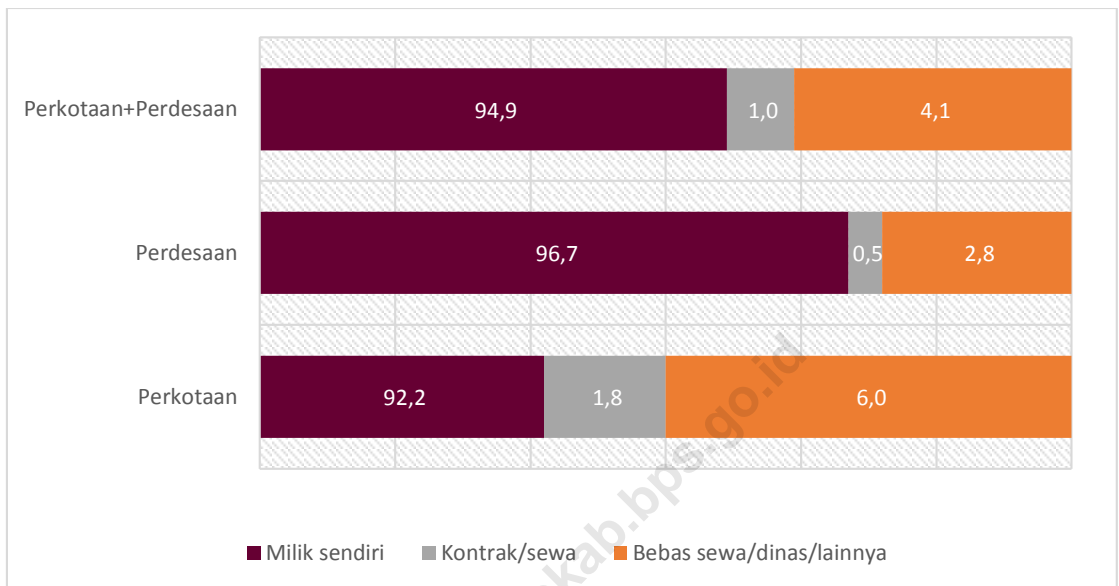
Sumber: Susenas

Status Kepemilikan Rumah

Status kepemilikan rumah menjadi indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Semakin baik tingkat kesejahterannya maka semakin baik pula status kepemilikan rumahnya. Orang yang kaya lebih memilih memiliki rumah sendiri dibandingkan kontrak atau sewa. Bahkan, orang-orang dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi menjadikan rumah sebagai salah satu investasi mereka bukan lagi sekedar pemenuhan kebutuhan pokok. Hal tersebut membuat harga rumah terus melonjak setiap tahunnya. Lonjakan tersebut sangat dirasakan di Kabupaten Cilacap dimana tahun 2019 andil inflasi tahunan untuk kelompok barang perumahan, listrik, air, gas, dan bahan bakar menempati peringkat kedua setelah kelompok bahan makanan dan makanan jadi.

Sekitar 90 persen rumah yang dihuni di Kabupaten Cilacap merupakan rumah milik sendiri. Persentase kepemilikan rumah di perkotaan lebih sedikit dibandingkan di wilayah perdesaan. Hal tersebut masih berkaitan dengan tingginya harga perumahan khususnya di wilayah perkotaan Cilacap. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah, banyak yang memilih kontrak atau sewa. Banyaknya pekerja pendatang di perkotaan Cilacap juga mendorong kebutuhan perumahan yang bersifat sementara yaitu dengan kontrak atau sewa. Mega proyek yang ada di Cilacap seperti: Proyek Langit Biru Cilacap (PLBC), kilang minyak Pertamina, dan PLTU Kesugihan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pekerja pendatang bahkan pekerja asing untuk tinggal di Cilacap selama proyek berlangsung.

Gambar 6.4 Status kepemilikan rumah berdasarkan tipe wilayah di Kabupaten Cilacap tahun 2019



Sumber: Susenas

KEMISKINAN CILACAP

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Cilacap dalam dua tahun terakhir menurun, begitu pula persentasenya. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2018 mencapai 185 ribu jiwa atau sekitar 10,73 persen dari total penduduk Cilacap. Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 adalah angka kemiskinan sebesar 7,43 persen sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Cilacap belum



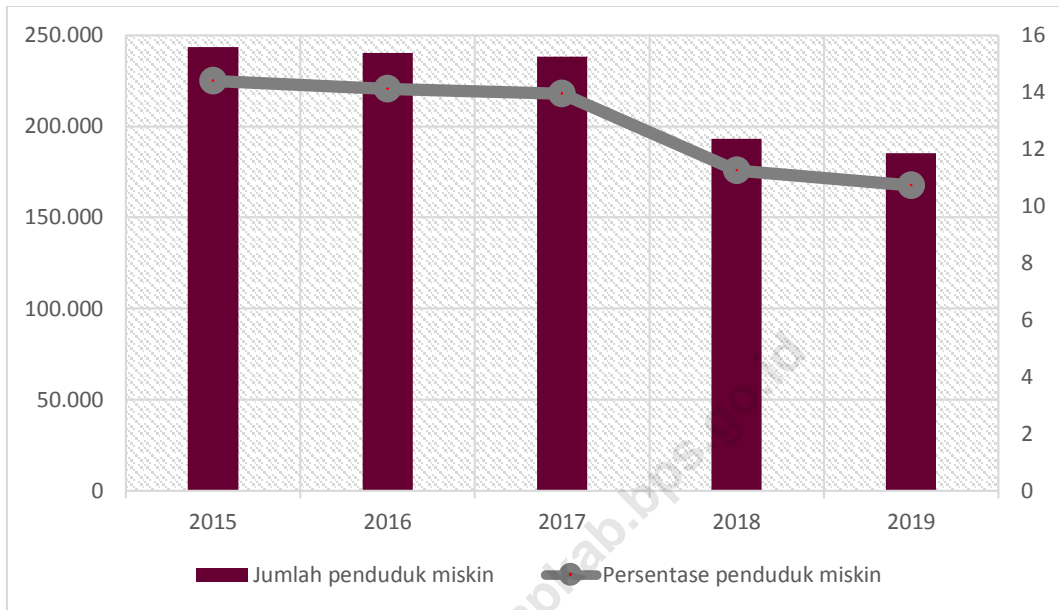
Sumber gambar: VectorStok.com

berhasil mencapai target tersebut. Meskipun demikian penurunan persentase penduduk miskin dalam kurun waktu 5 tahun cukup signifikan dimana pada tahun 2015 mencapai 14 persen dan di tahun 2019 menjadi 11 persen. Program-program pengentasan kemiskinan harus dilanjutkan kembali dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat miskin agar mereka terlepas dari lingkaran kemiskinan.

Perkembangan penduduk miskin

Pembangunan adalah suatu upaya untuk mewujudkan kemakmuran bagi masyarakat. Salah satu agenda pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah pengurangan kemiskinan. Kemiskinan, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), adalah ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya baik yang berbentuk makanan maupun non makanan. Untuk mengukur kemiskinan secara makro, BPS mengadakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang diselenggarakan setiap tahunnya sampai dengan level kabupaten/kota. Dari survei tersebut akan didapatkan indikator-indikator untuk mengukur kemiskinan seperti: jumlah dan persentase penduduk miskin, garis kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan.

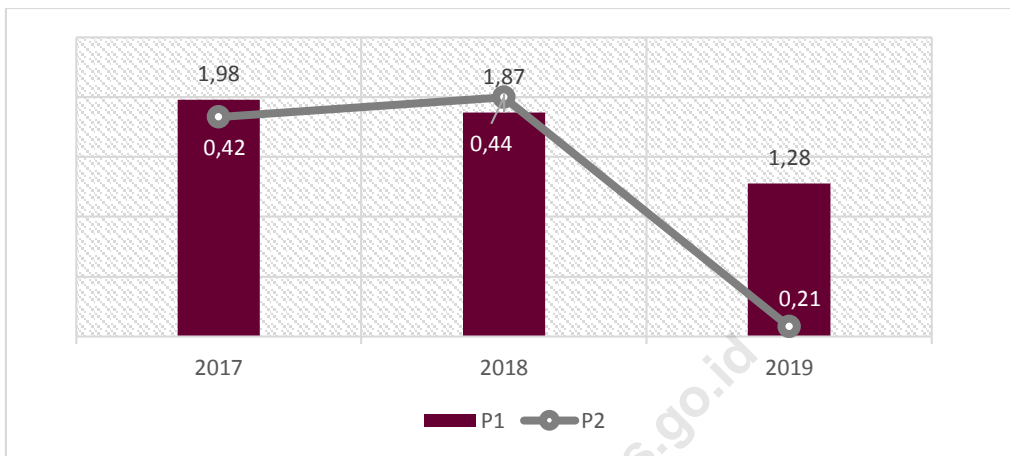
Gambar 7.1 Jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Cilacap 2015-2019



Sumber: Susenas

BPS menggunakan indikator Garis Kemiskinan (GK) dalam menentukan kemiskinan secara makro. Garis kemiskinan adalah nilai pengeluaran minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan makanan dan nonmakanan. Kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Kebutuhan nonmakanan meliputi: perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin, begitu pula sebaliknya. Garis kemiskinan selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018 garis kemiskinan Kabupaten Cilacap 320 ribu rupiah kemudian meningkat dan berada pada posisi 337 ribu rupiah pada tahun 2019. Meningkatnya garis kemiskinan dipengaruhi oleh meningkatnya gaya hidup masyarakat dengan mengkonsumsi lebih banyak barang dan jasa. Selain itu, kenaikan harga barang dan jasa (inflasi) juga turut mendorong peningkatan garis kemiskinan.

Gambar 7.2 Indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) kabupaten Cilacap, 2017-2019



Sumber: Susenas

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Dengan kata lain, semakin kecil nilai indeks maka semakin baik kondisi penduduk miskin. Nilai kesenjangan pengeluaran penduduk miskin di Cilacap semakin kecil setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa program untuk mengurangi kemiskinan mulai menunjukkan hasil. Meskipun masih ada penduduk miskin di Cilacap, tetapi kesenjangan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar dibandingkan masyarakat yang tidak miskin hampir mendekati.

Hal yang sejalan terekam pula pada indeks keparahan kemiskinan (P2). Indeks tersebut memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin rendah nilai indeks maka semakin kecil pula ketimpangan diantara penduduk miskin. Ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin Cilacap bergerak turun signifikan mulai tahun 2017 dan pada tahun 2019 bernilai 0,21. Semakin homogen kondisi penduduk miskin semakin mudah pula untuk melakukan program-program pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran.

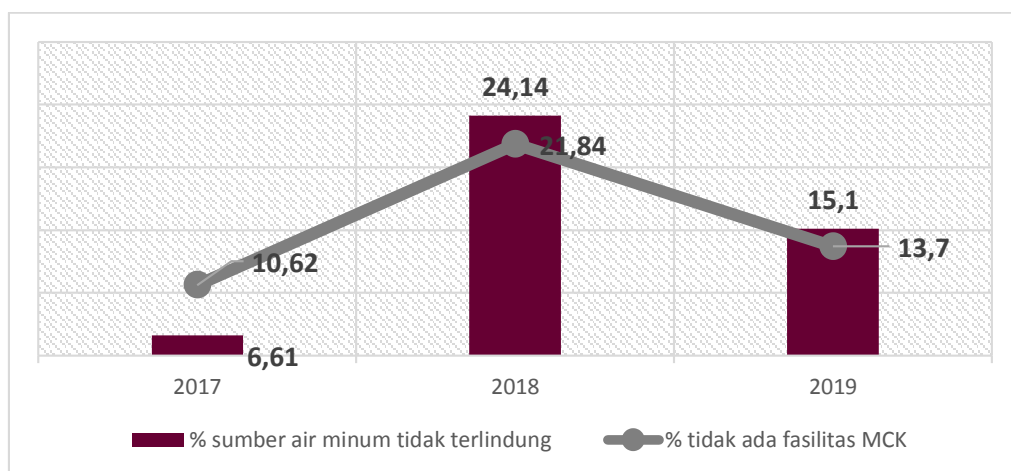
Karakteristik perumahan ruta miskin

Kondisi rumah sangat berpengaruh terhadap kesehatan penghuninya. Semakin bersih suatu rumah maka peluang penyebaran kuman penyakit akan semakin kecil. Sehingga para penghuni rumah tersebut tetap terjaga kesehatannya. Derajat kesehatan yang tinggi memberikan kesempatan bagi seseorang untuk bekerja dengan lebih baik dan memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Demikian pula kondisi yang berlaku untuk rumah tangga miskin. Pemerintah seharusnya menyediakan fasilitas perumahan yang layak untuk mereka. Kondisi perumahan yang baik akan menciptakan peluang hidup sehat sehingga produktivitasnya ikut terdongkrak pula. Di kabupaten Cilacap, sebagian besar rumah tangga miskin menggunakan sumur terlindung sebagai sumber mata airnya sebanyak 49 persen. Namun, masih banyak juga yang menggunakan sumber air minum yang tidak terlindung seperti: sumur terbuka, mata air terbuka, dan air hujan. Sebanyak 15 persen rumah tangga miskin pada tahun 2019 terancam terkena paparan penyakit karena menggunakan sumber air minum yang tidak layak tersebut.

Hal yang sejalan terjadi pada fasilitas untuk mandi, cuci, dan kakus. Semenjak tiga tahun terakhir di Cilacap kondisinya memprihatinkan. Semakin banyak rumah tangga miskin yang tidak memiliki fasilitas MCK (Mandi Cuci Kakus) untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kondisi ini akan membuat rumah tangga miskin semakin rentan terhadap paparan penyakit. Meskipun demikian capaian pada tahun 2019 menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Gambar 7.3 Persentase rumah tangga miskin Cilacap yang tidak memiliki fasilitas MCK dan sumber air minumnya tidak terlindung, 2017-2019



Sumber: Susenas

D A T A

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN CILACAP

Jl. Dr. Soetomo No 18 A Cilacap 53212

Telp. (0282) 534328, Fax. (0282) 535011

Homepage: <https://cilacapkab.bps.go.id>

E-mail: bps3301@mailhost.bps.go.id